

DAFTAR PUSTAKA

A.Referensi

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Anita DA Kolopaking, 2013, *Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Indonesia*, (Bandung: PT Alumni)
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, (Jakarta: Djambatan)
- Budiman. Sinaga. 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi.
- Dyah Ochtriani dan A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Munir Fuady. 2015, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- Ridwan H.R,2013, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ridwan H.R,2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Sigit Sapto Nugroho , et.al,2017,*Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam)
- Suharnoko. 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto,2005, *Penelitian Hukum, Cetakan 6* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Urip Santoso,2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenamedia Group)

B.Hasil Penelitian/Jurnal

- Budiyono,Muhtadi, Ade Arif Firmansyah,2015, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.*
- Ermahri, Ulima Fhadiah, Betty Rubiati, and Mulyani Djakaria.2021, "Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Oleh Warga Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terhadap Jalur Kereta Api Nonaktif." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.*
- Himsar, N. 2017, *Problametika Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Mifta Farid,Antikowati, Rosita Indrayati,2017, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah, E-Journal Lentera Hukum.*
- Moh Gandara,2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, Khazanah Hukum.*
- Nasrul, O.2018, *Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api oleh Pihak Ketiga. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.*
- Okky Nasrul.2019, *Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, Soumater Law Review.*
- Rio Ch. Rondonuwu,2018, *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, Lex Crimen.*
- Rahmawaty, M. A., & Ananda, M. 2020, Analisis Pelaksanaan Pensertipikatan Aset Tanah PT. Kereta Api Indonesia dengan Alas Hak Grondkaart di Kabupaten Kudus (Studi Kasus: Desa Ploso). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik.*

Tresna,A.2021. *Penguasaan Tanah PT. Kereta Api (PERSERO) oleh masyarakat di desa soreng, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung(Studi Tentang Potensi Konflik Tanah Dan Prospek Solusinya)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Wintoko, D. H. 2019. Peralihan Hak Atas Tanah Milik Negara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata. *Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar*(tanpavolume),(tanpanomor)link:<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/download/726/pdf>.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Segala Urusan Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 melarang Tindakan penelantaran tanah secara sengaja

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan konversi Hak Menguasai Negara

Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 atau disingkat PMA. Dalam PMA tersebut ditetapkan konversi hak penguasaan atas tanah-tanah negara

Peraturan Pemerintah terbaru No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan